



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM KEMENTERIAN HUKUM

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Konteks, Penilaian Risiko, Perlakuan Risiko, serta Pemantauan dan reviu;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum; dan
3. Rencana Perlakuan Risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin, untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan pemantauan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.



Ditetapkan di Depok
Tanggal, 13 Maret 2026
Kepala BPSDM Hukum


Gusli Ayu Putu Suwardani

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Periode Penerapan: 2026

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	1	Kurangnya perencanaan Pelatihan Bidang Hukum yang efektif
2				Ketidak sesuaian antara jenis pelatihan dengan pekerjaan dan tugas sehari-hari peserta pelatihan	
3				Keterbatasan jenis pelatihan teknis SDM Bidang Hukum	
4				Belum terpetakannya Gap Kompetensi teknis SDM Bidang Hukum	
5				Keterbatasan jumlah peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum, khususnya JFT Bidang Hukum yang pembinaannya berada di bawah Kemenkum	
6				Masih rendahnya kualitas tenaga pengajar/ Widyaiswara	
7				Kurikulum pelatihan yang kurang implementatif dengan isu bidang hukum terkini	
8				Keterlambatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan	

					kerjasama pengembangan kompetensi
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	9	Ketidaksesuaian persyaratan layanan pengembangan kompetensi bidang Hukum
				10	Ketidajelasan alur dan waktu pelayanan pengembangan kompetensi bidang Hukum
				11	Kurangnya kualitas layanan yang diterima
				12	Kurangnya kompetensi petugas pembanga kompetensi bidang hukum
				13	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum
				14	layanan pengaduan, saran dan masukan yang kurang responsif
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	15	Ketidaklengkapan Dokumen data dukung RKT RB
				16	Ketidaksesuaian data dukung dengan TND Kementerian Hukum
				17	Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan RB secara berkala
				18	Koordinasi antar unit kerja kurang efektif
				19	Ketidak sesuaian penempatan SDM pada Pokja RB
				20	Keterlambatan penyusunan dan pengunggahan eviden RB sesuai jadwal
Konteks MR : Risiko Fraud					
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan	21	Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis bidang hukum tidak

			Kompetensi SDM Bidang Hukum		sesuai dengan kriteria/ persyaratan peserta pelatihan dimaksud
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB
	24			Pelaporan kegiatan RB yang tidak dilaksanakan sepenuhnya hanya untuk pemenuhan data dukung	
	25			Konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana atau pihak pendukung kegiatan RB	

Konteks MR : Risiko Keuangan

3	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26	Adanya efisiensi anggaran pengembangan kompetensi Bidang Hukum
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	27	Efisiensi anggaran layanan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	28	Efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan RB di BPSDM Hukum

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan
---	----------------------------	--	--	----	---

		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB
--	--	--	--	----	--

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**

Periode Penerapan: **2026**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	1	Kurangnya perencanaan Pelatihan Bidang Hukum yang efektif	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	Internal
			2	Ketidak sesuaian antara jenis pelatihan dengan pekerjaan dan tugas sehari-hari peserta pelatihan	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	Internal dan Eksternal
			3	Keterbatasan jenis pelatihan teknis SDM Bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan	Internal

							teknis bidang hukum		
			4	Belum terpetakannya Gap Kompetensi teknis SDM Bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	Internal
			5	Keterbatasan jumlah peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum, khususnya JFT Bidang Hukum yang pembinaannya berada di bawah Kemenkum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	Internal
							5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	Internal
			6	Masih rendahnya kualitas tenaga pengajar/ Widyaiswara	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	Internal
							6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	Internal
			7	Kurikulum pelatihan yang kurang implementatif dengan isu	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas	Internal

				bidang hukum terkini				dalam penyusunan kurikulum.	
							7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	Internal
		8	Keterlambatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan kerjasama pengembangan kompetensi	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	Internal	
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	9	Ketidaksesuaian persyaratan layanan pengembangan kompetensi bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	Internal	
		10	Ketidajelasan alur dan waktu pelayanan pengembangan kompetensi bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	Internal	
		11	Kurangnya kualitas layanan yang diterima	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	Internal	
						11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	Internal	

			12	Kurangnya kompetensi petugas pengembang kompetensi bidang hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	Internal
			13	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	Internal
							13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	Internal
			14	layanan pengaduan, saran dan masukan yang kurang responsif	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	Internal
							14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	Internal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General	15	Ketidaklengkapan Dokumen data dukung RKT RB	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	Internal

		Kementerian Hukum	16	Ketidaksesuaian data dukung dengan TND Kementerian Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	Internal
			17	Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan RB secara berkala	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan monev belum optimal	Internal
			18	Ketidak sesuaian penempatan SDM pada Pokja RB	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	Internal
			19	Keterlambatan penyusunan dan pengunggahan eviden RB sesuai jadwal	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud									
2	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	20	Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis bidang hukum tidak sesuai dengan kriteria/ persyaratan peserta pelatihan dimaksud	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	Internal
							20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	Internal

	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	21	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	Internal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	22	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Internal
23			Pelaporan kegiatan RB yang tidak dilaksanakan sepenuhnya hanya untuk pemenuhan data dukung	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Internal	
24			Konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana atau pihak pendukung kegiatan RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	Internal	

Konteks MR : Risiko Keuangan

3	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	25	Adanya efisiensi anggaran pengembangan kompetensi Bidang Hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya	Eksternal
---	--	--	----	--	-----------------	--------------------	------	---	-----------

	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26	Efisiensi anggaran layanan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/orga nisasi.	Eksternal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	27	Efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan RB di BPSDM Hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/orga nisasi.	Eksternal

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Internal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Internal

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum**
Periode Penerapan: **2026**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi perencanaan pelatihan	20%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko sedang
4.1	Data profil kompetensi SDM	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang

	Bidang Hukum belum mutakhir.								
5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%	Jarang terjadi	2	Moderat	3	11	Risiko Rendah

7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan pelatihan	5%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%	Jarang terjadi	2	Tidak Signifikan	1	2	Risiko Sangat Rendah

13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko rendah
14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reviu/evaluasi akhir	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan monev belum optimal	Persentase koordinasi antar unit kerja pengampu RB yang tidak optimal	15%	Hampir pasti terjadi	5	Signifikan	4	23	Risiko Sangat Tinggi
18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

Konteks MR: Fraud

20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%	Hampir tidak terjadi	1	Minor	2	3	Risiko Sangat Rendah

22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	Jarang terjadi	2	Moderat	3	11	Risiko Rendah
Konteks MR: Keuangan									
25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainnya	35%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB	35%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko:

**Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum**

Periode Penerapan:

2026

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi	1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan	14	13	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi	20%

		SDM Bidang Hukum		Bidang Hukum belum optimal			perencanaan pelatihan	
			2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	7	25	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%
			3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	14	14	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%
			4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	14	15	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%
			5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	14	16	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%
			5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	7	26	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%

			6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap isu terkini	14	17	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%
			6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	14	18	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%
			7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	11	23	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%
			7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	14	19	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%
			8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	14	20	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum	7	27	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan	5%

Kompetensi SDM Bidang Hukum	terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum		dilakukan secara ketat.			persyaratan pelatihan	
		10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	14	21	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%
		11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	14	22	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%
		11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	16	5	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%
		12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	2	34	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%
		13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	16	6	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%
		13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	16	7	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%

				belum dilakukan secara rutin.				
			14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	7	28	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%
			14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	7	29	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	16	8	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reviu/evaluasi akhir	15%
			16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	16	9	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%
			17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan	23	1	Persentase koordinasi antar unit kerja	15%

				monev belum optimal			pengampu RB yang tidak optimal	
			18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	16	10	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%
			19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	16	11	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%
Konteks MR: Fraud								
2								
	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	7	30	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%
			20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	7	31	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembang	21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem	3	33	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%

		an Kompetensi SDM Bidang Hukum		dan pelaksanaan.				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	
		23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	
		24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	11	24	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	
Konteks MR: Keuangan								
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk	16	2	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainya	35%

				program prioritas lainnya				
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	3	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	4	Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB	35%
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)								
1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%

	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%
--	--	--	------	--	---	----	---	----

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**

Periode Penerapan: **2026**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Cr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan monev belum optimal	23	1	Persentase koordinasi antar unit kerja pengampu RB yang tidak optimal	15%	Prv.17.1	Peningkat kapasitas SDM pengampu RB	kegiatan pengembangan kompetensi pengampu RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.17.1	Menyusun SOP monev RB lintas unit kerja	SOP monev RB lintas unit kerja	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.17.1	Menyusun jadwal monev RB secara berkala	jadwal monev RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait	16	2	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainnya	35%	Prv.25.1	Koordinasi dengan unit kerja / satker	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

	penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya						terkait efisiensi anggaran.			
						RM.25.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.25.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	3	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%	Prv.26.1	Koordinasi dengan unit kerja / satker terkait efisiensi anggaran.	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.26.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.26.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing	16	4		35%	Prv.27.1	Koordinasi dengan unit	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

	anggaran pemerintah/organisasi.					kerja / satker terkait efisiensi anggaran.				
				Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB		RM.27.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.27.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	16	5	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Prv.11.1	Inventaris sarana dan prasarana	Nodis pemberitahuan kondisi sarana dan prasarana	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris, Kepala Pusat dan Direktur Poltekpin
						RM.11.1	Pengawasan sarana dan prasarana	kegiatan pengawasan sarana dan prasarana	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
						Crr.11.1	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak	16	6	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Prv.13.1	Inventaris sarana dan prasarana	Kartu Identitas Barang (KIB)	1 (B09)	Sekretaris BPSDM

	memadai atau usang.					RM.13.1	Penghapusan BMN	kegiatan penghapusan BMN	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.13.1	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	16	7	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%	Prv.13.2	Inventaris sarana dan prasarana	Daftar inventaris Ruang (DIR)	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						RM.13.2	Perawatan sarana dan prasarana	kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.13.2	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	16	8	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reuiu/evaluasi akhir	15%	Prv.15.1	Penyusunan dan penetapan SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) pemenuhan data dukung RKT RB	SOP Monev Pemenuhan Data Dukung RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.15.1	Penyusunan checklist standar data dukung RKT RB	Dokumen checklist pemenuhan data dukung	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						Crr.15.1	Melakukan pendampingan teknis RB	kegiatan pendampingan	1 (B09)	Sekretaris BPSDM

16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	16	9	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%	Prv.16.1	Memanfaatkan media digital sebagai sarana sosialisasi dan berbagi dokumen	Membuat group sosial media	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.16.1	Melaksanakan sosialisasi TND	kegiatan sosialisasi TND	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						Crr.16.1	Melakukan pendampingan teknis TND	kegiatan pendampingan teknis TND	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	16	10	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%	Prv.18.1	Melakukan pemetaan kompetensi SDM sebelum penetapan keanggotaan Pokja RB	Kegiatan pemetaan kompetensi	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						RM.18.1	Melakukan pendampingan dan coaching anggota pokja RB	Kegiatan pendampingan	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.18.1	Mengusulkan pergantian atau penambahan anggota Pokja RB	Penggantian Anggota	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	16	11	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%	Prv.19.1	Menyelaraskan penetapan anggota Pokja RB dengan tupoksi unit kerja dan jabatan masing-masing SDM	Pemetaan anggota Pokja sesuai tupoksi	1 (B06)	Sekretaris BPSDM

						RM.19.1	Pembagian peran dan tugas Pokja RB secara spesifik sesuai tupoksi	Dokumen uraian tugas pokja sesuai tupoksi	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.19.1	Penambahan atau penggantian anggota Pokja RB dari unit yang relevan	Penggantian Anggota	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Prv.22.1	Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan data dan dokumen RB	Dokumen SOP	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.22.1	Melakukan validasi ulang data serta dokumen RB	Kegiatan validasi oleh verifikator data dukung	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	14	13	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi perencanaan pelatihan	20%	Prv.1.1	Pelaksanaan rapat koordinasi secara hybrid (daring dan/atau luring)	Koordinasi perencanaan pelatihan	2 (B03, B09)	Sekretaris dan Kepala Pusat Pelatihan
						RM.1.1	Penjadwalan rapat koordinasi secara periodik dan terintegrasi	Koordinasi perencanaan pelatihan	2 (B03, B09)	Sekretaris dan Kepala Pusat Pelatihan

3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	14	14	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%	Prv.3.1	Menyusun rencana pelatihan teknis Bidang Hukum ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, RKA, dan DIPA).	Rencana pelatihan teknis Bidang Hukum	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan dan Kepala Balai Diklat
						RM.3.1	Melakukan penyesuaian Metode pelaksanaan Pelatihan	Penyesuaian metode pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan dan Kepala Balai Diklat
4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	14	15	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%	Prv.4.1	Melakukan pemutakhiran data profil kompetensi SDM secara berkala	Pemutakhiran data profil	1 (B06, B09)	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
						RM.4.1	Melakukan pemetaan kompetensi SDM secara bertahap	Pemetaan kompetensi	1 (B06, B09)	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	14	16	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%	Prv.5.1	Menyusun rencana pelatihan JFT Bidang Hukum ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, RKA, dan DIPA).	Rencana pelatihan JFT bidang hukum	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

						RM.5.1	Melakukan penyesuaian Metode pelaksanaan Pelatihan	Penyesuaian metode pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	14	17	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%	Prv.6.1	Menyusun rencana pengembangan kompetensi Widyaiswara secara periodik yang memuat topik isu strategis dan regulasi terbaru.	Rencana pengembangan kompetensi Widyaiswara	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.6.1	Melakukan reviu dan pembaruan materi ajar secara berkala agar selaras dengan isu dan regulasi terbaru.	Reviu dan pembaharuan materi ajar	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	14	18	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%	Prv.6.2	Menyusun standar metode pembelajaran inovatif yang mewajibkan pemanfaatan teknologi oleh Widyaiswara.	Metode pembelajaran inovatif	1 (B06,)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.6.2	Melakukan evaluasi dan monitoring penerapan teknologi pembelajaran	evaluasi dan monitoring penerapan teknologi pembelajaran	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

							secara berkala.			
7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	14	19	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%	Prv.7.2	Melakukan reviu dan pembaruan kurikulum secara berkala agar tetap relevan dan aplikatif.	reviu dan pembaharuan kurikulum	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.7.2	Menyusun modul pendukung yang aplikatif untuk melengkapi kurikulum yang masih teoritis	Modul pendukung yang aplikatif	1 (B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	14	20	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%	Prv.8.1	Penugasan SDM sesuai kompetensi dan beban kerja	Pembentukan Tim Pengelola Kerjasama	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.8.1	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis/bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bidang kerjasama	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	14	21	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%	Prv.10.1	Menyusun SOP pengendalian perubahan mekanisme dan alur pelayanan.	SOP alur pelayanan	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

						RM.10. 1	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan alur pelayanan terbaru.	Monitoring dan evaluasi penerapan alur pelayanan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	14	22	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%	Prv.11. 1	Meningkatkan kompetensi SDM layanan melalui pelatihan pemanfaatan teknologi informasi.	Kompetensi SDM layanan pelatihan teknologi dan informasi	1 (B06,)	Sekretaris BPSDM
						RM.11. 1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dalam layanan secara berkala.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	11	23	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%	Prv.7.1	Melakukan evaluasi kurikulum berbasis umpan balik peserta pelatihan sebagai bahan penyempurnaan berkelanjutan.	Umpan balik peserta pelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	11	24	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	Prv.24. 1	Menyusun dan menerapkan mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan RB yang terbuka	Mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

							dan terdokumentasi.			
2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	7	25	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%	Prv.2.1	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta terhadap kriteria dan persyaratan jenis pelatihan.	Verifikasi dan validasi data peserta pelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	7	26	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%	Prv.5.2	Menjadwalkan pemeliharaan dan optimalisasi sarana kelas pelatihan agar selalu sesuai standar.	pemeliharaan dan optimalisasi sarana kelas pelatihan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	7	27	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan pelatihan	5%	Prv.9.1	Melaksanakan evaluasi kesesuaian peserta pascapelatihan	Evaluasi peserta pascapelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	7	28	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%	Prv.14.1	Menyusun dan menetapkan SOP khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan	SOP penanganan pengaduan	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	7	29	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%	Prv.14.2	Melakukan monitoring dan evaluasi beban kerja SDM layanan pengaduan	Monitoring dan evaluasi beban kerja SDM layanan pengaduan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM

							secara berkala.			
20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	7	30	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%	Prv.20.1	Mengevaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta sebagai bahan perbaikan proses penetapan.	Evaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta pelatihan	2 (B09 dan B12)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	7	31	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%	Prv.20.2	Melaksanakan rapat koordinasi dan klarifikasi kebutuhan pelatihan sebelum pelaksanaan.	Rapat koordinasi dan klasifikasi kebutuhan pelatihan	3 (B03, B06 dan B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Prv.23.1	Melakukan reviu kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan kegiatan	reviu kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan kegiatan	2 (B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	3	33	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%	Prv.21.1	Melakukan pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan regulasi tarif yang berlaku.	Pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan regulasi tarif	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM

12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	2	34	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%	Prv.12.1	Menyusun dan menyediakan panduan/SOP pengelolaan pelatihan Bidang Hukum yang mudah dipahami.	SOP pengelolaan pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
------	--	---	----	---	-----	----------	--	---------------------------	------------	-------------------------------------

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**

Periode Penerapan: **2026**

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	1	Kurangunya perencanaan Pelatihan Bidang Hukum yang efektif
				2	Ketidak sesuaian antara jenis pelatihan dengan pekerjaan dan tugas sehari-hari peserta pelatihan
				3	Keterbatasan jenis pelatihan teknis SDM Bidang Hukum
				4	Belum terpetakannya Gap Kompetensi teknis SDM Bidang Hukum
				5	Keterbatasan jumlah peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum, khususnya JFT Bidang Hukum yang pembinaannya berada di bawah Kemenkum
				6	Masih rendahnya kualitas tenaga pengajar/ Widyaiswara
				7	Kurikulum pelatihan yang kurang implementatif dengan isu bidang hukum terkini
				8	Keterlambatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan

					kerjasama pengembangan kompetensi
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	9	Ketidaksesuaian persyaratan layanan pengembangan kompetensi bidang Hukum
				10	Ketidajelasan alur dan waktu pelayanan pengembangan kompetensi bidang Hukum
				11	Kurangnya kualitas layanan yang diterima
				12	Kurangnya kompetensi petugas pembanga kompetensi bidang hukum
				13	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum
				14	layanan pengaduan, saran dan masukan yang kurang responsif
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	15	Ketidaklengkapan Dokumen data dukung RKT RB
				16	Ketidaksesuaian data dukung dengan TND Kementerian Hukum
				17	Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan RB secara berkala
				18	Koordinasi antar unit kerja kurang efektif
				19	Ketidak sesuaian penempatan SDM pada Pokja RB
				20	Keterlambatan penyusunan dan pengunggahan eviden RB sesuai jadwal
Konteks MR : Risiko Fraud					
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan	21	Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis bidang hukum tidak

			Kompetensi SDM Bidang Hukum		sesuai dengan kriteria/ persyaratan peserta pelatihan dimaksud
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB
				24	Pelaporan kegiatan RB yang tidak dilaksanakan sepenuhnya hanya untuk pemenuhan data dukung
				25	Konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana atau pihak pendukung kegiatan RB

Konteks MR : Risiko Keuangan

3	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26	Adanya efisiensi anggaran pengembangan kompetensi Bidang Hukum
		Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	27	Efisiensi anggaran layanan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	28	Efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan RB di BPSDM Hukum

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan
---	----------------------------	--	--	----	---

		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB
--	--	--	--	----	--

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**

Periode Penerapan: **2026**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	1	Kurangnya perencanaan Pelatihan Bidang Hukum yang efektif	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	Internal
			2	Ketidak sesuaian antara jenis pelatihan dengan pekerjaan dan tugas sehari-hari peserta pelatihan	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	Internal dan Eksternal
			3	Keterbatasan jenis pelatihan teknis SDM Bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan	Internal

							teknis bidang hukum		
			4	Belum terpetakannya Gap Kompetensi teknis SDM Bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	Internal
			5	Keterbatasan jumlah peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum, khususnya JFT Bidang Hukum yang pembinaannya berada di bawah Kemenkum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	Internal
							5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	Internal
			6	Masih rendahnya kualitas tenaga pengajar/ Widyaiswara	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	Internal
							6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	Internal
			7	Kurikulum pelatihan yang kurang implementatif dengan isu	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas	Internal

				bidang hukum terkini				dalam penyusunan kurikulum.	
							7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	Internal
		8	Keterlambatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan kerjasama pengembangan kompetensi	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	Internal	
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	9	Ketidaksesuaian persyaratan layanan pengembangan kompetensi bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	Internal	
		10	Ketidajelasan alur dan waktu pelayanan pengembangan kompetensi bidang Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	Internal	
		11	Kurangnya kualitas layanan yang diterima	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	Internal	
						11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	Internal	

			12	Kurangnya kompetensi petugas pengembang kompetensi bidang hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	Internal
			13	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	Internal
							13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	Internal
			14	layanan pengaduan, saran dan masukan yang kurang responsif	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	Internal
							14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	Internal
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General		15	Ketidaklengkapan Dokumen data dukung RKT RB	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	Internal

		Kementerian Hukum	16	Ketidaksesuaian data dukung dengan TND Kementerian Hukum	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	Internal
			17	Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan RB secara berkala	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan monev belum optimal	Internal
			18	Ketidak sesuaian penempatan SDM pada Pokja RB	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	Internal
			19	Keterlambatan penyusunan dan pengunggahan eviden RB sesuai jadwal	Risiko Operasional	Kepala BPSDM Hukum	19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	Internal

Konteks MR : Risiko Fraud

2	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	20	Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis bidang hukum tidak sesuai dengan kriteria/ persyaratan peserta pelatihan dimaksud	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	Internal
							20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	Internal

	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	21	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	Internal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	22	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Internal
23			Pelaporan kegiatan RB yang tidak dilaksanakan sepenuhnya hanya untuk pemenuhan data dukung	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Internal	
24			Konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana atau pihak pendukung kegiatan RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	Internal	

Konteks MR : Risiko Keuangan

3	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	25	Adanya efisiensi anggaran pengembangan kompetensi Bidang Hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya	Eksternal
---	--	--	----	--	-----------------	--------------------	------	---	-----------

	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26	Efisiensi anggaran layanan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi bidang hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/orga nisasi.	Eksternal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	27	Efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan RB di BPSDM Hukum	Risiko Keuangan	Kepala BPSDM Hukum	27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/orga nisasi.	Eksternal

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22	Ketidak sesuaian tarif yang telah ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Internal
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23	rekayasa data dan Dokumen data dukung RB	Risiko Fraud	Kepala BPSDM Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Internal

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum**
Periode Penerapan: **2026**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi perencanaan pelatihan	20%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko sedang
4.1	Data profil kompetensi SDM	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang

	Bidang Hukum belum mutakhir.								
5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%	Jarang terjadi	2	Moderat	3	11	Risiko Rendah

7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan pelatihan	5%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%	Jarang terjadi	2	Tidak Signifikan	1	2	Risiko Sangat Rendah

13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko rendah
14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reviu/evaluasi akhir	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan monev belum optimal	Persentase koordinasi antar unit kerja pengampu RB yang tidak optimal	15%	Hampir pasti terjadi	5	Signifikan	4	23	Risiko Sangat Tinggi
18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

Konteks MR: Fraud

20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%	Hampir tidak terjadi	1	Minor	2	3	Risiko Sangat Rendah

22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah
24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	Jarang terjadi	2	Moderat	3	11	Risiko Rendah
Konteks MR: Keuangan									
25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainnya	35%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi
27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB	35%	Sering terjadi	4	Moderat	3	16	Risiko Tinggi

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Kadang terjadi	3	Moderat	3	14	Risiko Sedang
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Jarang terjadi	2	Minor	2	7	Risiko Rendah

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko:

**Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum**

Periode Penerapan:

2026

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi	1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan	14	13	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi	20%

		SDM Bidang Hukum		Bidang Hukum belum optimal			perencanaan pelatihan	
			2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	7	25	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%
			3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	14	14	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%
			4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	14	15	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%
			5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	14	16	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%
			5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	7	26	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%

			6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap isu terkini	14	17	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%
			6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	14	18	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%
			7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	11	23	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%
			7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	14	19	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%
			8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	14	20	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum	7	27	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan	5%

Kompetensi SDM Bidang Hukum	terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum		dilakukan secara ketat.			persyaratan pelatihan	
		10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	14	21	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%
		11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	14	22	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%
		11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	16	5	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%
		12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	2	34	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%
		13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memadai atau usang.	16	6	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%
		13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	16	7	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%

				belum dilakukan secara rutin.				
			14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	7	28	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%
			14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	7	29	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	16	8	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reviu/evaluasi akhir	15%
			16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.	16	9	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%
			17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan	23	1	Persentase koordinasi antar unit kerja	15%

				monev belum optimal			pengampu RB yang tidak optimal	
			18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	16	10	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%
			19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	16	11	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%
Konteks MR: Fraud								
2								
	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	7	30	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%
			20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	7	31	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembang	21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem	3	33	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%

		an Kompetensi SDM Bidang Hukum		dan pelaksanaan.				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	
		23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	
		24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	11	24	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	
Konteks MR: Keuangan								
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait penghematan dan refocusing anggaran untuk	16	2	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainya	35%

				program prioritas lainnya				
	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	3	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	4	Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB	35%
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)								
1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%

	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%
--	--	--	------	--	---	----	---	----

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko: **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**

Periode Penerapan: **2026**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Cr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	Koordinasi antar unit pengampu RB dalam pelaksanaan movev belum optimal	23	1	Persentase koordinasi antar unit kerja pengampu RB yang tidak optimal	15%	Prv.17.1	Peningkat kapasitas SDM pengampu RB	kegiatan pengembangan kompetensi pengampu RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.17.1	Menyusun SOP movev RB lintas unit kerja	SOP movev RB lintas unit kerja	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.17.1	Menyusun jadwal movev RB secara berkala	jadwal movev RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
25.1	Kebijakan nasional/organisasi terkait	16	2	Persentase efisiensi anggaran untuk program prioritas lainnya	35%	Prv.25.1	Koordinasi dengan unit kerja / satker	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

	penghematan dan refocusing anggaran untuk program prioritas lainnya						terkait efisiensi anggaran.			
						RM.25.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.25.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
26.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah/organisasi.	16	3	Persentase efisiensi anggaran untuk sarana dan prasarana pelatihan	50%	Prv.26.1	Koordinasi dengan unit kerja / satker terkait efisiensi anggaran.	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.26.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.26.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
27.1	Kebijakan efisiensi dan refocusing	16	4		35%	Prv.27.1	Koordinasi dengan unit	Rapat koordinasi	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

	anggaran pemerintah/organisasi.					kerja / satker terkait efisiensi anggaran.				
				Persentase efisiensi anggaran untuk kegiatan RB		RM.27.1	Penetapan skala prioritas kegiatan dalam dokumen perencanaan dan RKA.	Rapat penetapan skala prioritas	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						Crr.27.1	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan.	Revisi anggaran	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
11.2	Sarana dan prasarana pendukung layanan belum memadai.	16	5	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Prv.11.1	Inventaris sarana dan prasarana	Nodis pemberitahuan kondisi sarana dan prasarana	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris, Kepala Pusat dan Direktur Poltekpin
						RM.11.1	Pengawasan sarana dan prasarana	kegiatan pengawasan sarana dan prasarana	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
						Crr.11.1	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
13.1	Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak	16	6	Persentase layanan sarana dan prasarana yang tidak memadai	10%	Prv.13.1	Inventaris sarana dan prasarana	Kartu Identitas Barang (KIB)	1 (B09)	Sekretaris BPSDM

	memadai atau usang.					RM.13.1	Penghapusan BMN	kegiatan penghapusan BMN	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.13.1	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
13.2	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana belum dilakukan secara rutin.	16	7	Persentase sarana prasarana dalam kondisi kurang baik/rusak	10%	Prv.13.2	Inventaris sarana dan prasarana	Inventarisir BMN melalui Laser Barcode	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						RM.13.2	Perawatan sarana dan prasarana	kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.13.2	perencanaan pengadaan sarana dan prasarana	Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
15.1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung belum berjalan optimal	16	8	Persentase temuan ketidaklengkapan data dukung RKT RB pada saat reviu/evaluasi akhir	15%	Prv.15.1	Penyusunan dan penetapan SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) pemenuhan data dukung RKT RB	SOP Monev Pemenuhan Data Dukung RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.15.1	Penyusunan checklist standar data dukung RKT RB	Dokumen checklist pemenuhan data dukung	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						Crr.15.1	Melakukan pendampingan teknis RB	kegiatan pendampingan	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
16.1	Pemahaman unit kerja terhadap ketentuan dan	16	9	Persentase pegawai yang tidak memahami standar TND	20%	Prv.16.1	Memanfaatkan media digital sebagai	Membuat group sosial media	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

	standar TND Kementerian Hukum masih terbatas.						sarana sosialisasi dan berbagi dokumen			
						RM.16.1	Melaksanakan sosialisasi TND	kegiatan sosialisasi TND	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						Crr.16.1	Melakukan pendampingan teknis TND	kegiatan pendampingan teknis TND	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
18.1	Penempatan anggota Pokja RB belum berbasis kompetensi dan keahlian.	16	10	Persentase Penempatan anggota pokja RB yang tidak berbasis kompetensi	15%	Prv.18.1	Melakukan pemetaan kompetensi SDM sebelum penetapan keanggotaan Pokja RB	Kegiatan pemetaan kompetensi	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						RM.18.1	Melakukan pendampingan dan coaching anggota pokja RB	Kegiatan pendampingan	1 (B09)	Sekretaris BPSDM
						Crr.18.1	Mengusulkan pergantian atau penambahan anggota Pokja RB	Penggantian Anggota	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
19.1	Penempatan SDM pada Pokja dalam tim RB tidak sesuai dengan tupoksinya	16	11	Persentase penempatan anggota pokja RB tidak sesuai tupoksi	15%	Prv.19.1	Menyelaraskan penetapan anggota Pokja RB dengan tupoksi unit kerja dan jabatan masing-masing SDM	Pemetaan anggota Pokja sesuai tupoksi	1 (B06)	Sekretaris BPSDM
						RM.19.1	Pembagian peran dan tugas Pokja	Dokumen uraian tugas	1 (B09)	Sekretaris BPSDM

							RB secara spesifik sesuai tupoksi	pokja sesuai tupoksi		
							Crr.19.1 Penambahan atau penggantian anggota Pokja RB dari unit yang relevan	Penggantian Anggota	1 (B12)	Sekretaris BPSDM
22.1	Pengawasan dan pengendalian internal terhadap data dan dokumen RB belum optimal.	14	12	Persentase pengawasan dan pengendalian internal data dan dokumen RB yang tidak optimal	0%	Prv.22.1	Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan data dan dokumen RB	Dokumen SOP	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.22.1	Melakukan validasi ulang data serta dokumen RB	Kegiatan validasi oleh verifikator data dukung	4 (B03, B06, B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
1.1	Koordinasi antar satuan kerja terkait perencanaan pelatihan Bidang Hukum belum optimal	14	13	Persentase satuan kerja yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi perencanaan pelatihan	20%	Prv.1.1	Pelaksanaan rapat koordinasi secara hybrid (daring dan/atau luring)	Koordinasi perencanaan pelatihan	2 (B03, B09)	Sekretaris dan Kepala Pusat Pelatihan
						RM.1.1	Penjadwalan rapat koordinasi secara periodik dan terintegrasi	Koordinasi perencanaan pelatihan	2 (B03, B09)	Sekretaris dan Kepala Pusat Pelatihan
3.1	Keterbatasan anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	14	14	persentase anggaran pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bidang hukum	50%	Prv.3.1	Menyusun rencana pelatihan teknis Bidang Hukum ke dalam	Rencana pelatihan teknis Bidang Hukum	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan dan Kepala Balai Diklat

							dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, RKA, dan DIPA).			
						RM.3.1	Melakukan penyesuaian Metode pelaksanaan Pelatihan	Penyesuaian metode pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan dan Kepala Balai Diklat
4.1	Data profil kompetensi SDM Bidang Hukum belum mutakhir.	14	15	Persentase profil kompetensi SDM yang belum mutakhir	10%	Prv.4.1	Melakukan pemutakhiran data profil kompetensi SDM secara berkala	Pemutakhiran data profil	1 (B06, B09)	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
						RM.4.1	Melakukan pemetaan kompetensi SDM secara bertahap	Pemetaan kompetensi	1 (B06, B09)	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
5.1	Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT Bidang Hukum.	14	16	persentase anggaran pengembangan kompetensi untuk pelatihan JFT bidang hukum	50%	Prv.5.1	Menyusun rencana pelatihan JFT Bidang Hukum ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, RKA, dan DIPA).	Rencana pelatihan JFT bidang hukum	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.5.1	Melakukan penyesuaian Metode pelaksanaan Pelatihan	Penyesuaian metode pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

6.1	Minimnya pemutakhiran pengetahuan terhadap Isu terkini	14	17	Persentase widyaiswara yang tidak update informasi isu terkini	10%	Prv.6.1	Menyusun rencana pengembangan kompetensi Widyaiswara secara periodik yang memuat topik isu strategis dan regulasi terbaru.	Rencana pengembangan kompetensi Widyaiswara	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.6.1	Melakukan reviu dan pembaruan materi ajar secara berkala agar selaras dengan isu dan regulasi terbaru.	Reviu dan pembaharuan materi ajar	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
6.2	Metode pembelajaran masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal	14	18	Persentase widyaiswara yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran	10%	Prv.6.2	Menyusun standar metode pembelajaran inovatif yang mewajibkan pemanfaatan teknologi oleh Widyaiswara.	Metode pembelajaran inovatif	1 (B06,)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.6.2	Melakukan evaluasi dan monitoring penerapan teknologi pembelajaran secara berkala.	evaluasi dan monitoring penerapan teknologi pembelajaran	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

7.2	Kurikulum lebih bersifat teoritis dibandingkan aplikatif.	14	19	Persentase kurikulum yang tidak aplikatif	15%	Prv.7.2	Melakukan reviu dan pembaruan kurikulum secara berkala agar tetap relevan dan aplikatif.	reviu dan pembaharuan kurikulum	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
						RM.7.2	Menyusun modul pendukung yang aplikatif untuk melengkapi kurikulum yang masih teoritis	Modul pendukung yang aplikatif	1 (B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
8.1	Keterbatasan SDM pengelola kerja sama.	14	20	Persentase SDM pengelola kerja sama yang tidak memiliki kompetensi	30%	Prv.8.1	Penugasan SDM sesuai kompetensi dan beban kerja	Pembentukan Tim Pengelola Kerjasama	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.8.1	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis/bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bidang kerjasama	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
10.1	Perubahan kebijakan atau mekanisme layanan tidak diikuti dengan pembaruan alur pelayanan.	14	21	persentase mekanisme layanan yang tidak update	10%	Prv.10.1	Menyusun SOP pengendalian perubahan mekanisme dan alur pelayanan.	SOP alur pelayanan	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
						RM.10.1	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan alur	Monitoring dan evaluasi penerapan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM

							pelayanan terbaru.	alur pelayanan		
11.1	Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan belum optimal.	14	22	persentase layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi	15%	Prv.11.1	Meningkatkan kompetensi SDM layanan melalui pelatihan pemanfaatan teknologi informasi.	Kompetensi SDM layanan pelatihan teknologi dan informasi	1 (B06,)	Sekretaris BPSDM
						RM.11.1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dalam layanan secara berkala.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI		
7.1	Keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan bidang hukum masih terbatas dalam penyusunan kurikulum.	11	23	Persentase kurikulum yang tidak melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan	10%	Prv.7.1	Melakukan evaluasi kurikulum berbasis umpan balik peserta pelatihan sebagai bahan penyempurnaan berkelanjutan.	Umpan balik peserta pelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
24.1	Proses penunjukan pelaksana atau pendukung kegiatan RB tidak transparan.	11	24	Persentase penunjukan pelaksana kegiatan RB yang tidak transparan	0%	Prv.24.1	Menyusun dan menerapkan mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan RB yang terbuka dan terdokumentasi.	Mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan RB	1 (B03)	Sekretaris BPSDM

2.1	Penentuan peserta pelatihan Bidang Hukum yang tidak sesuai kriteria jenis pelatihan	7	25	Persentase peserta pelatihan bidang hukum yang tidak sesuai dengan kriteria jenis pelatihan	5%	Prv.2.1	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta terhadap kriteria dan persyaratan jenis pelatihan.	Verifikasi dan validasi data peserta pelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
5.2	Kapasitas kelas pelatihan yang terbatas, baik secara luring maupun daring.	7	26	persentase sarana kelas pelatihan yang tidak sesuai standar pelatihan	10%	Prv.5.2	Menjadwalkan pemeliharaan dan optimalisasi sarana kelas pelatihan agar selalu sesuai standar.	pemeliharaan dan optimalisasi sarana kelas pelatihan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
9.1	Verifikasi dan validasi persyaratan peserta belum dilakukan secara ketat.	7	27	Persentase peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan pelatihan	5%	Prv.9.1	Melaksanakan evaluasi kesesuaian peserta pascapelatihan	Evaluasi peserta pascapelatihan	2 (B06, B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
14.1	Pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan yang tidak ditangani sesuai standar waktu layanan	7	28	Persentase pengaduan/saran/masukan peserta pelatihan yang tidak ditindaklanjuti sesuai standar waktu layanan	10%	Prv.14.1	Menyusun dan menetapkan SOP khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan peserta pelatihan	SOP penanganan pengaduan	1 (B03)	Sekretaris BPSDM
14.2	Keterbatasan Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani layanan pengaduan.	7	29	Persentase SDM pengelola layanan pengaduan yang belum memiliki pelatihan/sertifikasi layanan pengaduan	10%	Prv.14.2	Melakukan monitoring dan evaluasi beban kerja SDM layanan pengaduan secara berkala.	Monitoring dan evaluasi beban kerja SDM layanan pengaduan	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM

20.1	Penetapan peserta lebih didasarkan pada pertimbangan administratif dari pada kebutuhan kompetensi.	7	30	Persentase penetapan peserta pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	0%	Prv.20.1	Mengevaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta sebagai bahan perbaikan proses penetapan.	Evaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta pelatihan	2 (B09 dan B12)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
20.2	Koordinasi antara unit pengusul dan penyelenggara pelatihan kurang efektif.	7	31	Persentase koordinasi dengan unit pengusul yang tidak efektif	0%	Prv.20.2	Melaksanakan rapat koordinasi dan klarifikasi kebutuhan pelatihan sebelum pelaksanaan.	Rapat koordinasi dan klasifikasi kebutuhan pelatihan	3 (B03, B06 dan B09)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
23.1	Fokus pada kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas pelaksanaan kegiatan.	7	32	Persentase kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan kualitas pelaksanaan kegiatan	0%	Prv.23.1	Melakukan reviu kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan kegiatan	reviu kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan kegiatan	2 (B09 dan B12)	Sekretaris BPSDM
21.1	Perubahan kebijakan atau regulasi tarif belum segera disesuaikan dalam sistem dan pelaksanaan.	3	33	Persentase regulasi dan tarif yang tidak sesuai dengan perubahan kebijakan atau regulasi	0%	Prv.21.1	Melakukan pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan regulasi tarif yang berlaku.	Pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan regulasi tarif	2 (B06, B09)	Sekretaris BPSDM
12.1	Minimnya pengalaman teknis petugas dalam pengelolaan pelatihan Bidang Hukum.	2	34	Persentase petugas teknis yang tidak berpengalaman mengelola pelatihan bidang hukum	10%	Prv.12.1	Menyusun dan menyediakan panduan/SOP pengelolaan pelatihan Bidang Hukum	SOP pengelolaan pelatihan	1 (B03)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

							yang mudah dipahami.			
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--